

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Masalah Penelitian

1.1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga merupakan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembangunan daerah merupakan hal yang tidak terlepas dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan itu sangat dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dipacu untuk sedapat mungkin berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pengeluaran daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran bagi setiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerahnya. Di sisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah karena otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai salah satu daerah otonom, sudah seharusnya melaksanakan program-program pembangunan baik program jangka pendek maupun jangka panjang, untuk merealisasikan program pembangunan tersebut, pemerintah daerah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah salah satunya melalui pajak reklame. Karena apabila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi, sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Bekasi yang sudah otonom dan merupakan tempat-tempat yang strategis untuk perorangan atau badan yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya.

Dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat terpenuhi. Sehingga dengan mengoptimalkan

penerimaan dari pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bekasi. Karena semakin besar kontribusi pajak reklame bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin mendukung pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan daerah.

Mengetahui adanya potensi kontribusi yang tinggi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penulis bermaksud membahas lebih jauh mengenai seberapa besar dari penerimaan pajak reklame terhadap kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BEKASI”**.

1.1.2 Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka timbul permasalahan yang menjadi fokus utama, yaitu: “Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bekasi”.

1.1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah target dan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2008-2012 di Kota Bekasi?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2008-2012 di Kota Bekasi?
3. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008-2012 Kota Bekasi?
4. Apa kendala serta upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi?

1.2 Kerangka Teori

1.2.1 Identifikasi Variable Penelitian

Variabel penelitian adalah kontribusi pajak reklame sebagai variabel mandiri, karena penelitian ini merupakan deskriptif yang hanya memberikan gambaran kontribusi pajak reklame kaitannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bekasi.

1.2.2 Uraian Konsepsional Tentang Variabel

Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang dapat diukur dengan uang karena wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi adalah sumbangan atau iuran yang diperoleh dari pajak reklame melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi yang ditinjau dari objek, target dan realisasi dalam setiap satu tahun anggaran yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi. Semakin tinggi kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin mandiri suatu daerah tersebut.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2008-2012 di Kota Bekasi.

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2008-2012 di Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008-2012 di Kota Bekasi.
4. Untuk mengetahui kendala serta upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pengembangan potensi pajak daerah Kota Bekasi, khususnya pajak reklame.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari dampak dan pentingnya membayar pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kota Bekasi dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi.

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang analisis kontribusi penerimaan pajak reklame Kota Bekasi.